



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

LAPORAN LAUNCHING E-GOVERNMENT DAN FORUM PEMBANGUNAN PAPUA

Jayapura 8-9 Maret 2017



Daftar Isi

LAUNCHING E-GOVERNMENT PAPUA

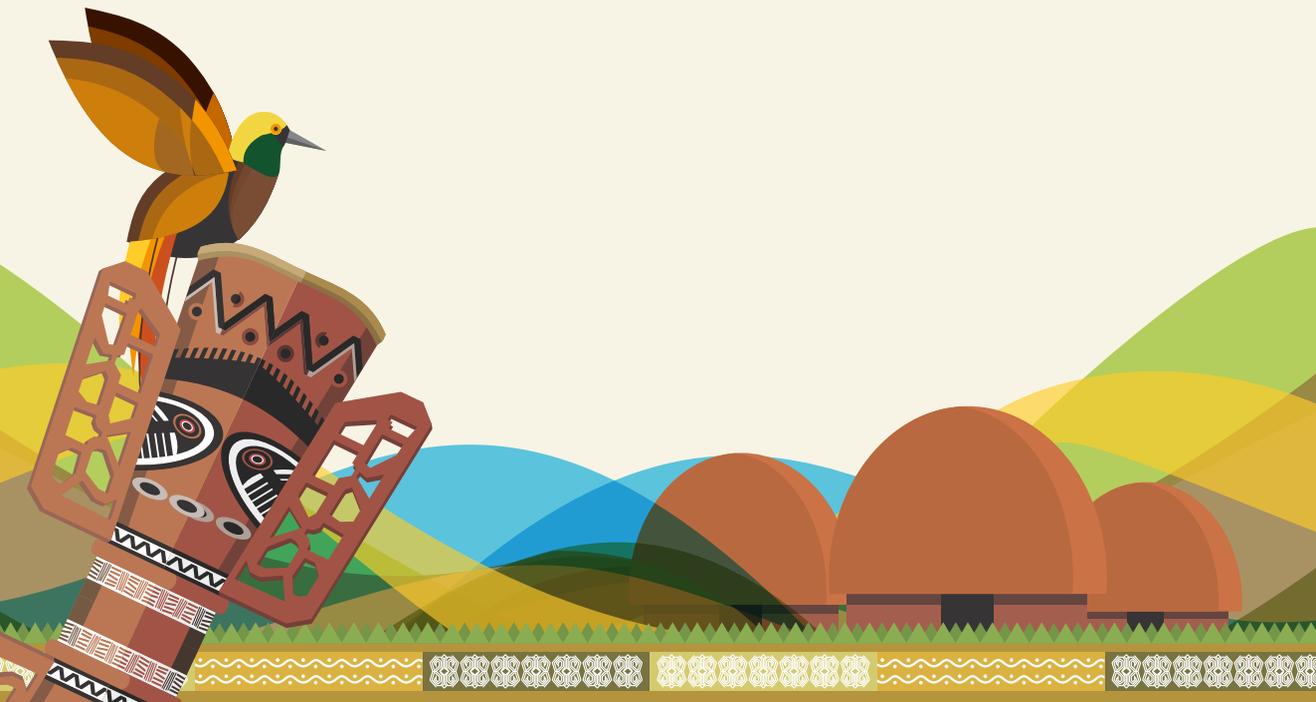
- 1 Persiapan Menuju E-government Papua
- 3 Prosa
- 4 Laporan Ketua Panitia
- 5 Testimoni
- 7 Sambutan
- 14 Penandatanganan Peraturan Gubernur Pendukung E-government Provinsi Papua
- 15 Demonstrasi E-government
- 16 Sambutan Gubernur Papua Sekaligus Peluncuran E-government Dan Pembukaan Forum Pembangunan Papua
- 17 Penandatanganan Pakta Integritas Kepala Daerah Se Provinsi Papua

FORUM PEMBANGUNAN PAPUA

- 18 Talkshow Pembangunan Papua
Topik : **Gabung Jurus untuk Membangun Papua**
- 23 Talkshow Tematik Pemberdayaan Ekonomi & Masyarakat
Topik : **Kampung Bisa !**
- 32 Talkshow Tematik Lingkungan Hidup
Topik : **Pembangunan Berkelanjutan**
- 40 Talkshow Tematik Pendidikan
Topik : **Saya Pandai Calistung**
- 49 Talkshow Tematik Kesehatan
Topik : **Satgas Kijang**

LAUNCHING **E-GOVERNMENT** **PAPUA**

Gedung Sasana Krida,
Kantor Gubernur Provinsi Papua,
8 Maret 2017



PERSIAPAN MENUJU E-GOVERNMENT PAPUA



1 Penandatanganan MOU Pemprov Papua dengan Pemprov Jabar 25 November 2016.



2 Bintek e-Musrenbang dan e-Budgeting di Sidoarjo 08-11 November 2016.



3 Laporan POKJA RENAKSI tentang tindak lanjut program Renaksi sebagai bahan laporan akhir tahun 2016 ke KPK.



4 Monev Renaksi oleh KPK di bulan Desember 2016



5 Monev dengan 5 Kab (Kab Kota Jayapura, Sarmi, Keerom, dan Mamberamo Raya) 5-6 Desember 2016.



6 Pertemuan Task force SIAP melaporkan Progress bid. perencanaan penganggaran, perijinan, dan samsat.



7 Diskusi antara programmer dan task force bidang perencanaan penganggaran.



8 Laporan Tim RENAKSI ke Pak Gubernur tentang Perkembangan RENAKSI.



9 Paparan e-Gov dan Persiapan launching di KPK Jakarta.



10 Pelatihan tim teknis (pendamping) e-gov Bappeda.



11 Pelatihan tim teknis 16-02-2017.



12 Pembukaan pelatihan e-Gov bagi perangkat daerah Provinsi Papua oleh sekretaris daerah.



13 Sosialisasi e-musrenbang oleh Sekda tanggal 22-24 Februari 2017.



14 Pelatihan Kabupaten Kota 23-24 Februari 2017.



15 Rapat pembahasan rencana launching di pimpin oleh sekda.



16 Rapat Pembentukan Panitia Launching e-Gov01-02-2017.



17 Persiapan tim sekretariat launching 08 Februari 2017.



18 Pertemuan dengan EO 21 Februari 2017



19 Diskusi Run down launching e-gov 22 Februari 2017



20 Kunjungan ke Sasana Krida oleh tim sekretariat bidang acara.



Launching E-Government Papua & Forum Pembangunan Papua, Sasana Krida 8 Maret 2017

Prosa

Bayangkan sebuah peta, bayangkan sebuah perjalanan

Perjalanan dapat kita tempuh untuk bermacam alasan

Untuk meraih cita-cita pribadi,

Atau untuk bangkit mengokohkan diri sebagai bangsa

Sebagai Papua dalam peta perjalanan, Hari ini akan ditandai sebagai terminal teknologi

Dalam perjalanan bersama Animha, Saireri Mamta, Me Pago, La Pago

Menuju kemandirian

Meraih kesejahteraan

Semangat kebangkitan di terminal ini

Adalah panji-panji reformasi birokrasi

Tata kelola pemerintahan Papua

Dari rencana sampai biaya

Akan bermakna :

'Satu rupiah yang jatuh di Tanah Papua, akan tumbuh dan berbuah kebaikan

Lalu dari sana

datang perubahan kehidupan

Bagi orang Papua'

Ya, E-Gov ini memang berbasis teknologi,

Dari terminal teknologi ini,

- Seperti mata air dari tempat tinggi mengalirkan pecahan emas

di Tanah Amungsa-

Akan berangkat -lepas

Ketepatan sasaran dan layanan

Serta kepastian

pemanfaatan dan buah tiap rupiah

Ya, E-Gov ini memang soal pembangunan

jejaring rumit aplikasi dan semangat

transparansi

dalam menu modernisasi

Tapi dalam senyap teknologi ,

Terminal ini masih milik Orang Papua, Ini bukan nilai yang dengannya kita harus beradaptasi

Sebab jejaring dan transparansi

Telah terjalin lama, meski digiling peradaban Ketika dari sulur tanaman, menjelma Noken.

Wadah sarat makna,

Jejaring dan transparansi

Yang sekarang tuan puan sampirkan di badan.

Jangan sampirkan Noken, semata sebagai hiasan

Tapi sandang sebagai ingatan bahwa kita masih dalam perjalanan.

Selempangkan Noken dan jadikan peringatan

Bahwa Papua yang Bangkit Mandiri dan Sejahtera

Harus dikerjakan bersama.

Dari terminal teknologi ini

Akan berangkat buldozer perubahan

Di jalan, akan ada yang harus tumbang!

Pohon-pohon kemakmuran yang ditanam untuk kemakmuran diri sendiri harus tumbang.

Korupsi harus dilawan,

untuk keperluan generasi yang belum datang.

Korupsi harus dicegah: cegah - lawan, lawan- cegah

Itu strategi perang,

Dalam perjalanan ke depan

Kita akan berjalan dari satu titik ke titik lain

Tidak dalam kegagalan,

Tidak dalam keterasingan teknologi

Tetapi seperti Noken,

bersama teknologi kita menjadi diri sendiri.

Luna Vidya



LAPORAN KETUA PANITIA

Hery Dosinaen

SEKDA PROVINSI PAPUA

Launching E-Government ini didasari atas komitmen pemerintah Provinsi Papua yang dipimpin oleh Bapak Gubernur untuk rencana aksi terkait E-Government Provinsi Papua. Hal ini berdasarkan Keputusan Gubernur No. 188 poin 4/290/2016 tanggal 18 Juli 2016 yang merupakan suatu rencana aksi dari arahan KPK bersama pemerintah Provinsi Papua. Tahapan-tahapan yang telah dilakukan tentunya atas dasar MoU pemerintah Provinsi Papua dengan Kota Surabaya dan juga pemerintah Provinsi Jawa Barat. Di lobby depan telah hadir juga bagaimana kita mengaplikasikan E-Samsat, E-Perizinan dan E-Planning. Inilah berbagai kegiatan yang tentunya bermuara pada E-Government. Bersama KPK dan Tim Rencana Aksi, kita telah melatih semua teman-teman dari 28 Kabupaten dan 1 Kota untuk bagaimana bisa mengaplikasikan E-Government ini. Akhir dari kegiatan ini tentunya ada kesepakatan integritas antara semua stakeholder, semua OPD dan juga pemerintah kab/kota yang tentunya ditandatangani dalam suatu Pakta Integritas yang disaksikan oleh Bapak Gubernur dan Pimpinan KPK. Atas nama panitia kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya dan setulus-tulusnya atas partisipasi aktif dan kehadiran Bapak-Ibu dalam launching E-Government. Kita semua sepakat dan atas dasar komitmen Bapak Gubernur, E-Government harus kita aplikasikan di Provinsi Papua, di provinsi paling timur Indonesia. Untuk itu, dengan penuh rasa hormat dan rendah hati kami mohon kesediaan Bapak Gubernur didampingi Ibu Ketua KPK dapat melaunching E-Government ini untuk bisa diaplikasikan di Provinsi Papua.

TESTIMONI

Di terminal, sebagai tempat singgah mari kita nikmati kesempatan untuk bertukar cerita dengan mereka yang telah lebih dulu menempuh basis teknologi dalam menyusur perjalanan pemerintahan masing-masing-masing. Selain memberi ruang bagi tamu lain yang berkenan datang dan ikut merayakan.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Dadang Muhammad Masoem

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU (DPMPTSP) PROVINSI JAWA BARAT

Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengapresiasi semangat Pemerintah Provinsi Papua yang telah memulai menerapkan sistem E-government pada pemerintahan mereka. Seperti diketahui Jawa Barat ditunjuk oleh KPK untuk membina 17 pemprov dalam reaplikasi tiga inovasi Jawa Barat tersebut yaitu aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), aplikasi SKP Online berbasis Tunjangan Perbaikan Penghasilan pegawai, dan aplikasi e-Samsat. Aplikasi ini akan langsung diterapkan di Provinsi Aceh, Bengkulu, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Lampung, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Demikian diungkapkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Barat, Dadang Muhammad Masoem, yang mewakili Gubernur Jawa Barat dalam Peluncuran E-Government Papua.

Setelah 17 pemprov melakukan nota kesepahaman (MoU) reaplikasi 3 inovasi di Jawa Barat tersebut, pemprov Jawa Barat secara bertahap melakukan pembinaan dan lokakarya. Adapun pembinaan dilakukan langsung ke pemerintah provinsi terkait. Sebelum Papua yang launching, pihaknya sudah mendatangi dua pemprov yaitu Sumatera Barat dan Bengkulu yang juga sudah melaunching setelah dibina Jabar.

Gubernur Jawa Barat selalu mendorong Bappeda, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dan DPMPTSP dalam menjalankan inovasi tersebut. E-Samsat mampu mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD), BKD dengan tunjangan penghasilan pegawai, dan DPMPTSP dengan e-Simpaty yang membuat para pemohon tidak langsung berhadapan langsung dengan aparat ketika mengurus izin. Menurut beliau, awalnya sulit, tapi sudah berjalan. Mudah-mudahan Papua bisa mengikutinya. Meski demikian, beliau tidak memungkiri masih ada banyak kekurangan dan sampai kini masih terus dievaluasi dengan perbaikan sistem.

Selain Bapak Dadang, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengirimkan utusan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jabar Dadang Suharto, Kepala dan Kepala BKD Jabar Sumarwan HS.



■ TESTIMONI

Mitra Pembangunan Internasional

Nicola Nixon

KONSELOR UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PEMBANGUNAN SOSIAL, DEPARTEMEN LUAR NEGERI DAN PERDAGANGAN AUSTRALIA (DFAT AUSTRALIA)

Kami sangat senang sekali dapat hadir di peluncuran E-Government dan juga Forum Pembangunan Papua. Kami sangat menantikan untuk bisa berdiskusi dengan Bapak/ Ibu sekalian dalam dua hari mendatang. Kami sangat memahami kapasitas dan juga berbagai kondisi tertentu dari Papua. Kami belajar banyak sekali dari kerjasama dengan berbagai pihak di Papua dan kami akan membicarakan praktik- praktik terbaik dan apa saja yang kami pelajari dari diskusi dua hari mendatang. Namun kami disini juga ingin belajar dari Ibu Bapak sekalian, jadi di dalam dua hari ini kita akan belajar bersama satu sama lain. Harapannya kami dapat memastikan semua upaya yang kami laksanakan dapat berdampak baik. Selamat atas peluncuran E-Government pada hari ini. Kami sangat menghargai pemerintah Papua karena inisiatif-inisiatif pemerintah Papua khususnya dalam peningkatan program E-Government dan juga peningkatan pelayanan publiknya. Kami menyadari banyak sekali potensi-potensi Papua di berbagai sektor untuk makin berkembang di masa depan. Kami disini untuk mendengarkan dan untuk mendampingi dengan cara yang tepat untuk mendukung agenda pemerintah dan tujuan-tujuan dari pemerintah. Terima kasih.



SAMBUTAN

Menteri Dalam Negeri

Sri Wahyuningsih

INSPEKTUR JENDERAL KEMENDAGRI

Kementerian Dalam Negeri menyampaikan apresiasi dan menyambut baik atas pelaksanaan acara pagi hari ini. Hari ini merupakan suatu inovasi dan merupakan terobosan penting yang dilakukan pemerintah Provinsi Papua dalam mewujudkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Aplikasi E-Government dan Forum Pembangunan Papua diharapkan mampu menghadirkan dokumen perencanaan dan pembangunan daerah Papua yang lebih berkualitas dan transparan. Esensi dan penggunaan elektronik di sektor pemerintahan dalam rangka membangun transparansi dan akuntabilitas di sektor pemerintah, hal ini sesuai dengan semangat RPJMN 2015-2019 yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015. Sasaran yang ingin diwujudkan dalam penerapan elektronik di sektor publik adalah meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dari setiap proses penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Harapannya adalah terbentuknya tata kelola pemerintahan yang baik ditandai dengan meningkatnya akses publik terhadap informasi kinerja dan efektifnya penerapan E-Government untuk mendukung birokrasi secara modern. Oleh karena itu, inisiatif dan inovatif yang dilakukan oleh pemerintah Prov. Papua dalam penerapan E-Government sangat kami apresiasi. Rencana pembangunan

daerah tersebut perlu dikoordinasikan, disinergikan dan diharmonisasikan dengan dokumen perencanaan lainnya seperti perencanaan nasional dan perencanaan tata keuangan. Selanjutnya perencanaan pembangunan daerah tersebut disusun dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis serta atas bawah dan bawah atas. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan Kementerian Dalam Menteri tentang penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah terdapat tujuh masalah substansial dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pembangunan daerah:

1. Adanya intervensi kepemilikan individu atau pihak-pihak tertentu sehingga perencanaan mengarah pada hal yang diinginkan bukan yang dibutuhkan. Hal ini terjadi karena kurangnya keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam mengawasinya.
2. Inkonsistensi antara dokumen perencanaan dan pembangunan seperti ada dokumen RPJMD maupun RKPD serta rencana tata ruang dan wilayah.
3. Perencanaan dan penganggaran selama ini lebih banyak didasarkan pada tugas dan fungsi masing-masing daerah daripada pencapaian sasaran pembangunan daerah yang efektif dan efisien.
4. Kurangnya koordinasi yang efektif antara perangkat daerah sehingga sering sekali suatu program menjadi duplikasi program bahkan terdapat program yang telah dilaksanakan ternyata tidak dapat dimanfaatkan. Hal ini terjadi karena program dukungan yang dikerjakan perangkat daerah lainnya belum selesai. Sebagai contoh, pada pembangunan terminal atau pasar, seringkali terminal dan pasarnya sudah selesai dibangun tetapi sarana penunjangnya seperti jalan, penerangan dan air bersih belum selesai sehingga terminal dan pasar tidak dapat dimanfaatkan.
5. Tidak jelasnya struktur kinerja anggaran dalam dokumen perencanaan sehingga sulit melihat keterhubungan input, output, outcome dan impact.
6. Kurangnya SDM yang memiliki kompetensi dalam perencanaan pembangunan sehingga permasalahan-permasalahan mendasar dalam dokumen perencanaan seperti kesalahan pada anggaran masih sering terjadi.
7. Peran aktif dalam pengawasan dokumen perencanaan dan pembangunan daerah belum optimal sehingga permasalahan-permasalahan di atas kadang terjadi dan berulang setiap tahunnya.

Merespon hal tersebut Kementerian Dalam Negeri bersama dengan KPK sejak tahun 2015 dan intensif di awal tahun 2016 telah mengeluarkan kebijakan dalam rangka menghadirkan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran yang efektif yaitu:

1. Membentuk tim pembina aplikasi E-planning dalam perencanaan dan pembangunan provinsi, kabupaten dan kota. Tim ini merupakan desk dan klinik tempat seluruh pemda berkonsultasi terkait penerapan E-planning.
2. Mewajibkan seluruh pemerintah daerah untuk menerapkan aplikasi E-planning dalam perencanaan pembangunan daerah provinsi, kabupaten dan kota mulai tahun 2017 sesuai surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/3761/Sj tanggal 10 Oktober 2016.

3. Memerintahkan kepada seluruh APIP daerah untuk melakukan review dokumen perencanaan dan pembangunan serta dokumen RPJMD dan Renstra perangkat daerah sesuai surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 50/781/B.1/IJ tanggal 24 Agustus 2016.
4. Menjadikan hasil review APIP sebagai salah satu persyaratan dokumen yang wajib disampaikan pada saat evaluasi maupun klarifikasi seperti pada penyusunan RKPD tahun 2017 sesuai Pemendagri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi RKPD tahun 2017.

Seluruh Upaya yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri tersebut di atas tujuannya tidak lain adalah menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan terpercaya sesuai dengan semangat Nawacita khususnya dalam menghadirkan pemerintah yang partisipatif dan membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk terlibat dalam pemerintahan.

Bapak Ibu, sebelum saya mengakhiri sambutan ini, saya ingin menyampaikan beberapa isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian bersama dalam menyusun dokumen perencanaan daerah antara lain :

1. Pengurangan kemiskinan dengan lebih memacu peningkatan kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat terutama pangan, pendidikan, kesehatan, air minum, sanitasi dan perumahan.
2. Pengurangan pengangguran dengan memperhatikan kondisi ketenagakerjaan saat ini.
3. Pembangunan infrastruktur dengan meningkatkan peran dan penanganan infrastruktur.
4. Kedaulatan pangan dengan titik berat pemberdayaan pada produsen pangan kecil.
5. Kedaulatan energi dengan terobosan baru dalam pengadaan energi yang didukung dengan pengembangan teknologi tepat guna.
6. Tata kelola pemerintahan, demokratisasi dan konduktivitas daerah dalam rangka reformasi birokrasi.

Saya menaruh harapan banyak kepada seluruh kepala daerah khususnya Provinsi Papua dan jajarannya untuk mengawal, mendorong dan menghadirkan secepat mungkin tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Akhirnya kami berharap semoga aplikasi E-Government dan pembukaan Forum Pembangunan Papua dapat memberikan sumbangan positif bagi kemajuan Provinsi Papua.



SAMBUTAN

Bappenas

Dr. Ir. Taufik Hanafi, MUP

Staf Ahli Menteri Bappenas Bidang Pemerataan dan Kewilayahan

Apresiasi dan penghargaan kepada pemerintah Provinsi Papua atas launching E-Government. Mungkin diantara kita disini belum tahu bahwa tidak banyak provinsi yang sudah melaunching e-Government. Baru tiga provinsi di Indonesia dan Papua adalah yang ke-empat. Dan kami juga menyambut baik karena di dalam e-Government ada komponen yang tidak kalah pentingnya yaitu komponen perencanaan dan penganggaran. Ini sangat penting bahwa untuk memastikan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran. Bagi Gubernur E-Government ini sangat penting untuk memastikan bahwa apa yang direncanakan itu terjadi di lapangan. Inilah salah satu instrumen penting manfaat yang ada di E-Government. Tadi disampaikan bahwa semangat untuk setiap rupiah yang dikeluarkan itu harus bisa memberikan kesejahteraan seluas-luasnya bagi masyarakat Prov Papua. E-Government itu salah satu transaksi dari objek semangat itu. Tapi ini bukan akhir, tapi baru tahap awal bagaimana ini dilaksanakan di lapangan. Yang kita saksikan pada hari ini baru tahap awal. Komitmen Prov Papua untuk meningkatkan dan mendekatkan layanan salah satunya di bidang kesehatan dan pendidikan juga akan memanfaatkan teknologi. Contohnya di dibidang kesehatan, pemerintah Papua bersama-sama Kementerian Kesehatan akan memanfaatkan teknologi

informasi yaitu mengembangkan *telemedicine*, bagaimana pendekatan wilayah kesehatan di Papua, dimana geografisnya sangat luas dan jumlah tenaga kesehatannya juga belum merata, maka dengan adanya *telemedicine* ini akan sangat mendorong mendekatkan layanan kesehatan pada masyarakat. Jadi komunikasi antara satuan-satuan layanan kesehatan mulai antar rumah sakit, rumah sakit dengan puskesmas, ini akan sangat terbantu dengan adanya pemanfaatan teknologi telekomunikasi, dan salah satu komponen utamanya adalah telekomunikasi informasi.

Demikian juga di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan kita akan memanfaatkan kearifan lokal yang ada di tanah Papua. Ternyata yang hadir disini pimpinan-pimpinan di Prov Papua ini sebagian besar adalah lulusan-lulusan dari sekolah-sekolah berasrama yang ada di wilayah Papua. Oleh karena itu pengembangan-pengembangan sekolah berasrama di wilayah Papua ini juga akan diperkuat. Jadi sekali lagi kami sangat bangga dan senang bahwa Prov Papua sebagai provinsi keempat yang telah melaunching E-Government ini dan akan memperkuat mulai dari aspek perizinan, perencanaan dan penganggaran dan ini juga akan memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Jadi ini baru tahap awal dan kami sangat mendukung semangat ini dan pengembangan-pengembangan atau komitmen-komitmen yang sangat tinggi ini juga bisa diterapkan di bidang pembangunan lainnya. Kami mengucapkan terima kasih telah mengundang Kementerian Bappenas dan kami juga siap terus bekerjasama dan mendukung pemerintah Provinsi Papua dalam perencanaan maupun dalam pembangunan-pembangunan di wilayah Papua.

■ SAMBUTAN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Basaria Panjaitan, S.H., M.H.

Wakil Ketua KPK

Apresiasi yang sangat luar biasa dari KPK kepada semua tim khususnya Gubernur Papua, Wakil Gubernur, dan Sekda dan seluruh pihak yang terlibat dalam E-Government, hingga hari ini dapat dilaunching. Tahun lalu tepatnya sekitar bulan Juli kami masih berbicara tentang ini. Dalam mewujudkan tata kelola yang baik harus ada transparansi. Kalau mau mewujudkan tata kelola yang bersih harus ada transparansi. Jadi jangan bicara tata kelola yang baik dan bersih kalau tidak ada transparansi. Transparansi ini bisa kita wujudkan dalam bentuk aplikasi, salah satunya apa yang disebut E-Government. Mulai dari musyawarah musrenbang, kemudian ada perencanaan dan sebagainya. Saya sudah lihat dan sudah dipaparkan, ada E-Papua Pu



Rencana, E-Papua Pu Musrenbang. Tadi malam saya tanya Pu-nya itu apa? Jadi Papua punya musrenbang, punya perencanaan, budgeting dan seterusnya. Kenapa KPK harus mengapresiasi dan salut kepada Papua? Sudah kita dengarkan tadi, ternyata Papua ini provinsi yang ke-empat, setelah Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Bengkulu. Tahun lalu bulan November KPK mengumpulkan 17 provinsi di Jawa Barat. Timnya Pak Dadang yang memberikan pengarahan kepada 17 provinsi tersebut. Dengan harapan apa yang dilakukan oleh Provinsi Papua kita anggap yang paling baik diantara yang lainnya. Harapan KPK adalah agar 17 provinsi tersebut bisa belajar dari Jawa Barat dan kemudian aplikasi tersebut akan diberikan secara cuma-cuma. Itulah harapan KPK didalam mencapai transparansi. Harapannya pada tahun 2018 semua provinsi di Indonesia sudah memakai aplikasi E-Government. Dengan adanya aplikasi tersebut kemungkinan untuk melakukan korupsi sudah semakin tipis. Kembali saya katakan lagi, secantik apapun nanti program atau aplikasi tersebut, tetap manusia yang ada di belakangnya yang paling utama. Aplikasi ini dibuat oleh manusia, juga bisa dikerjakan oleh manusia, tetapi paling tidak inilah salah satu cara yang kita usahakan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Puisi yang tadi dibawakan di awal membuat saya merinding. Semangatnya itu, "Satu Rupiah yang jatuh di Tanah Papua harus digunakan dengan baik untuk perubahan hidup orang Papua" Harapan kita tidak berhenti pada hari ini. Hari ini dilaunching dan baru akan dimulai. Yang kita perlukan adalah bagaimana nanti setelah hari ini. Saya tadi malam sudah berbicara dengan tim KPK, mereka akan selalu ada disini untuk mendampingi supaya E-Government bisa berjalan dengan baik. Harapannya nanti di tahun 2018 semua sudah benar-benar bisa dilihat di aplikasi ini. Jadi saat tim KPK ada disini, kalau ada kekurangan-kekurangan, mudah-mudahan nanti bisa kita bantu. Lalu yang kedua, terkait perizinan dengan aplikasi E-Perizinan. KPK juga sangat mengapresiasi akan hal ini. Mudah-mudahan semua yang namanya bentuk perizinan benar-benar terwujud dan bisa dilaksanakan. Dengan adanya

aplikasi ini yang tadinya tiga jam jadi bisa satu jam. Biasanya dilakukan pelatihan dulu dari tim Jawa Barat tapi ternyata Papua sudah punya sendiri. Yang kita harapkan nanti kalau didalam pelaksanaannya ada sesuatu hambatan sudah barang tentu komunikasi bisa dijalankan agar bisa berjalan dengan baik. Kalau di Jawa Barat bisa tiga jam, kira-kira Papua berani berapa jam? Paling tidak sama tiga jam. Pelayanan yang terbaik seharusnya itulah yang kita lakukan, semua aparat yang digaji oleh negara harusbekerja untuk kesejahteraan rakyat. Jadi satu yang harus kita ingat, kita digaji disini untuk melayani rakyat. Maka semua dana yang dikelola yang diterima dari rakyat juga hendaklah bisa dikembalikan juga untuk kesejahteraan rakyat tanpa dipotong satu rupiah pun untuk kepentingan diri sendiri, keluarga atau kelompok. Itu yang paling utama. Jadi jangan sampai nanti setelah ini dilaunching atau semua sudah benar-benar berjalan tapi korupsinya juga masih tetap jalan. Saya kasih contoh pengadaan barang dan jasa. Itu juga hanya bisa dimasuki oleh orang-orang tertentu juga. Walaupun sudah ada aplikasi atau sistem tersebut, ternyata sistem ini juga bisa diatur oleh manusia, sehingga yang bisa masuk ke dalam sistem tersebut hanya orang-orang yang memang diinginkan oleh orang tertentu saja. Ini merupakan hasil evaluasi dari beberapa daerah. Makanya saya katakan tadi, mudah-mudahan sistem ini akan mempermudah pelayanan terhadap masyarakat. Dan paling utama dengan adanya sistem ini nanti seluruh masyarakat dapat mengetahui kira-kira untuk apa atau sampai dimana pengelolaan dana yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kepada Bapak Gubernur dan seluruh personel yang ada di pemda, terima kasih banyak untuk pelaksanaan ini. Sekali lagi saya titip seluruh kekayaan yang ada di Papua ini dikelola dengan baik dan diarahkan untuk kesejahteraan rakyat.

Ada hal yang luput antara lain masalah dana desa. KPK sangat concern untuk dana desa. Karena tahun 2017 sebanyak Rp 60 triliun yang diberikan oleh pemerintah pusat dibagikan ke seluruh desa. Pak Kapolda atau yang mewakili, ini sudah dilatihkan, hari itu KPK bersama-sama dengan seluruh dirbinmas yang ada di Polda dikumpulkan dan dibagikan dalam bentuk CD supaya para dirbinmas nanti melatih bhabinkamtibmas yang ada di daerah masing-masing sehingga diharapkan nanti bhabinkamtibmas bisa mendampingi para kepala desa agar pemakaian uang yang diberikan kepada mereka tidak disalahgunakan. Jadi salah satu cara yang kita lakukan didalam pendampingan dana desa tersebut adalah mengikutsertakan bhabinkamtibmas karena bhabinkamtibmas ada di semua desa. Harapannya nanti mereka ikut mendampingi supaya dana desa tersebut benar-benar bisa dimanfaatkan untuk keperluan seluruh masyarakat desa. KPK meminta tolong kepada seluruh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah-APIP yang ada di tingkat daerah untuk membantu KPK didalam pengawasan seluruh penggunaan dana di masing-masing wilayahnya tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota. Kita harapkan jangan sampai para inspektorat, para pengawas intern ini tidak ada gunanya. Harapan kita seluruh APIP ini menjadi mitra dari KPK. Mudah-mudahan dengan dilaunchingnya E-Government ini, Papua bisa menjadi contoh dan menjadi yang terbaik diantara provinsi di Indonesia. Bila perlu nanti saingan dengan Jawa Barat. Jawa Barat untuk Indonesia Barat, Papua untuk Indonesia Timur yang akan melatih daerah lain.

■ PENANDATANGANAN PERATURAN GUBERNUR PENDUKUNG E-GOVERNMENT PROVINSI PAPUA

- a. Peraturan Gubernur tentang Penggunaan dan Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua
- b. Peraturan Gubernur tentang Penggunaan dan Pengelolaan Elektronik Budgeting Provinsi Papua
- c. Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik
- d. Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi
- e. Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat Secara Elektronik
- f. Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua
- g. Peraturan Gubernur tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.



DEMONSTRASI E-GOVERNMENT

Niscaya sebuah terminal sebelum beroperasi harus diinspeksi. Pastikan kesiapan, bahwa teknologi ini telah ada dalam kendali. Kiranya Bapak Gubernur berkenan memeriksa kesiapan pasukan, sebelum menandai pengoperasian dan keberangkatan.



SAMBUTAN GUBERNUR PAPUA SEKALIGUS PELUNCURAN E-GOVERNMENT DAN PEMBUKAAN FORUM PEMBANGUNAN PAPUA



Pemerintah Provinsi Papua secara resmi menerapkan aplikasi E-government dalam pelaksanaan pemerintahan, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. Penerapan aplikasi E-government merupakan salah satu misi pemerintahan provinsi yang dilaksanakan untuk menjadikan Papua dan masyarakatnya Bangkit, Mandiri dan Sejahtera.

Upaya perbaikan tata kelola pemerintahan telah dilaksanakan pada awal masa kepemimpinan saya dan wakil gubernur. Dimana, kami telah meletakkan pondasi untuk perbaikan pengelolaan keuangan daerah melalui sejumlah regulasi. Gubernur mengatakan beliau beserta jajarannya terus berupaya melakukan perbaikan dengan menerapkan sistem perencanaan dan penganggaran daerah, sistem perijinan serta sistem pelayanan Samsat secara online. Dengan menerapkan ketiga sistem tersebut, Gubernur berharap, pemerintah provinsi dan juga kabupaten/kota di Papua akan menjadi lebih efisien, efektif, akuntabel serta transparan.

Bapak/Ibu bisa melihat Noken yang kami berikan. Noken tersebut merupakan tas tradisional kami. Ketika orang menggunakan Noken, apa yang dibawa di dalam nokennya dapat dilihat oleh orang lain. Menurut beliau, budaya transparan sudah dikenal orang Papua sejak lama. Noken sebagai lambang transparansi masyarakat Papua. Masyarakat

Papua hanya kenal budaya transparan, Papua tidak mengenal korupsi. Atas dasar itu, Gubernur menghimbau kepada seluruh pejabat di Papua, baik DPR Papua, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk kembali ke budaya orang Papua dan meninggalkan budaya korupsi.

Gubernur Papua itu juga meminta kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Papua untuk bertanggung jawab secara baik penggunaan anggaran yang ada di Daftar Pengguna Anggaran (DPA) masing-masing.

Kami mengucapkan terima kasih kepada KPK yang telah mendampingi provinsi Papua dalam pelaksanaan E-Government. Apresiasi sebesar-besarnya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kemendagri, Bappenas, Mitra Pembangunan Internasional yang terus berupaya meningkatkan perbaikan pembangunan di Papua. Pembelajaran berharga dari pelaksanaan program mitra pembangunan di Papua ini dapat menjadi sumber informasi berharga bagi Pemerintah Provinsi Papua dalam merancang program-program khusus yang dapat mendukung pencapaian target pembangunan Papua.

■ PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS KEPALA DAERAH SE PROVINSI PAPUA



Hari ini kita tandai sebuah terminal baru; Yang hadir bagi pembangunan Papua, Terminal teknologi, E-Government; Ini bukan tipu-tipu.. Mari berangkat!

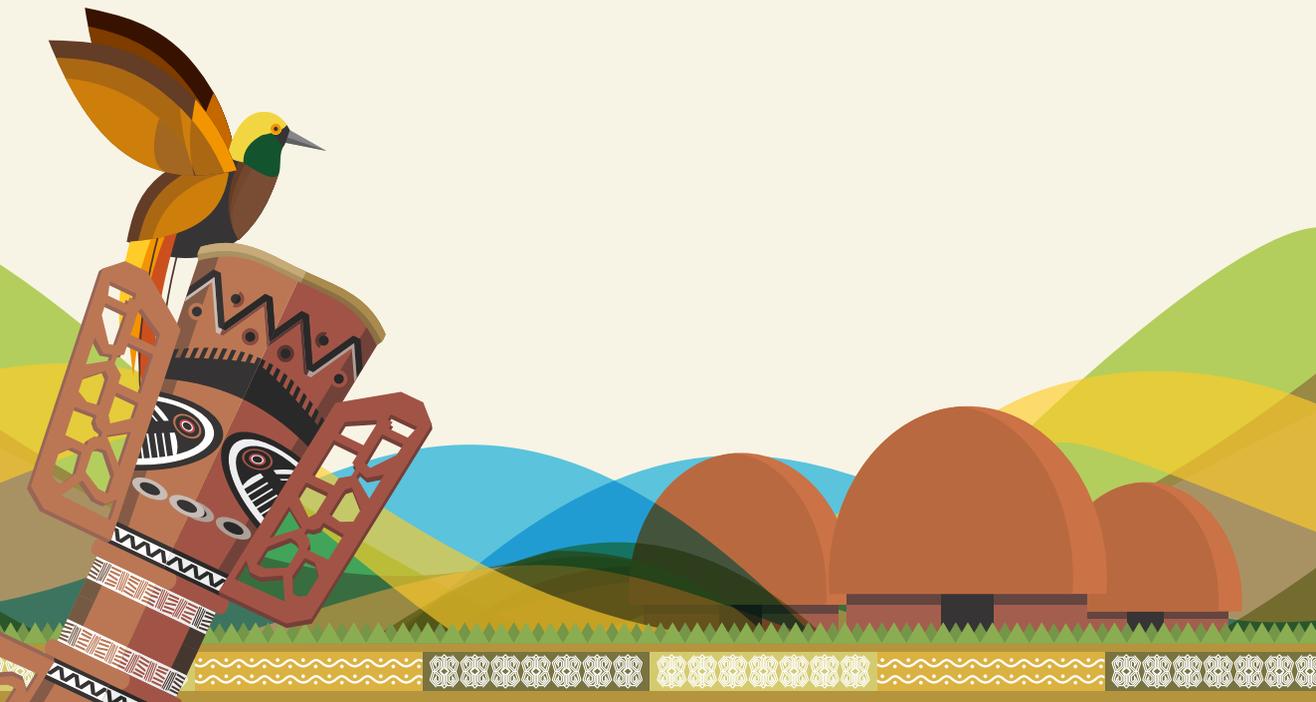
TALK SHOW

PEMBANGUNAN

PAPUA

TOPIK: GABUNG JURUS UNTUK MEMBANGUN PAPUA

Gedung Sasana Krida,
Kantor Gubernur Provinsi Papua,
8 Maret 2017



TALK SHOW PEMBANGUNAN PAPUA

TOPIK: GABUNG JURUS UNTUK MEMBANGUN PAPUA

DR. IR. TAUFIK HANAFI, MUP

Staff Ahli Menteri Bappenas Bidang Pemerataan dan Kewilayahan/
Koordinator Desk Papua

Prioritas Pembangunan Pemerintah Nasional untuk Pembangunan Papua

- Pembangunan di Propinsi Papua dan Papua Barat telah dijadikan sebagai prioritas pembangunan nasional
- Penguatan Perencanaan dan Penganggaran dilakukan dengan membangun E-Government
- Provinsi Jawa Barat ditunjuk sebagai pendamping pengembangan E-Government di seluruh provinsi
- Fokus pembangunan di Papua :
 1. Kesehatan : tele-medicine; Layanan Dokter KakiTelanjang.
 2. Pendidikan : pembangunan sekolah berasrama seperti di Sorong dan Lany Jaya Pembangunan Infrastruktur Jalan Raya, Sekolah, dll

Strategi Pemerintah Nasional untuk Pembangunan Papua

- Seluruh proses perencanaan dan penganggaran Pembangunan di Papua didasarkan atas :
 1. Konsultasi dengan Pemprov Papua untuk memastikan skala prioritas.
 2. Pendekatan berdasarkan 7 wilayah adat.
- Membangun Desk Papua di Bappenas yang akan mengkomunikasikan dan sinkronisasi seluruh program K/L untuk lakukan percepatan pembangunan di Papua

Kendala yang dialami Pemerintah Nasional dalam Pelaksanaan Program di Daerah

- Komunikasi dan Sinkronisasi Program Pembangunan di Papua

Dukungan yang Dibutuhkan Pemerintah Nasional untuk Pelaksanaan Program di Papua *

Mendukung Desk Papua dengan memasukkan data kebutuhan prioritas Papua

DR. Drs. M. MUSAAD, M.Si

Kepala Bappeda Provinsi Papua



Prioritas Pembangunan Pemerintah Nasional untuk Pembangunan Papua

- Program pengembangan ekonomi kampung dengan Gerbang Mas Hasrat Papua
- Kesehatan : Program Dokter Kaki Telanjang
- Pembangunan infrastruktur jalan raya, sekolah, pasar

Strategi Pemerintah Nasional untuk Pembangunan Papua

- Telah terjadi perubahan paradigma pembangunan nasional untuk Papua berbasis konsep dari yang diusulkan oleh Pemprov Papua (sebelumnya direncanakan di Jakarta tanpa melibatkan Provinsi Papua)
- Pendekatan sosial budaya dengan memasukkan 7 wilayah adat dalam RPJMD dan RPJMN
- Papua dimasukkan dalam BAB III dokumen RPJMN

Kendala yang dialami Pemerintah Nasional dalam Pelaksanaan Program di Daerah

- Kompleksitas masalah berbasis konteks lokal berdasarkan letak geografis, tingkat pendidikan, keragaman budaya, dll
- Berdasarkan indikator pembangunan di dalam data terlihat :
- Pertumbuhan ekonomi tinggi dan pengangguran rendah tetapi IPM rendah dan tingkat kemiskinan tinggi
- GAP antar Kabupaten / Kota dalam Provinsi Papua sehingga titik mulai pembangunan berbeda.
- Angka kemiskinan di Papua :
 - 2013 ----> **31,52%**
 - 2015 ----> **27%**
 - 2016 ----> **28%**
- Untuk seluruh program pembangunan masih fokus memperkuat komunitas untuk konsumtif belum memperkuat produktivitas meningkatkan komoditas.

Dukungan yang Dibutuhkan Pemerintah Nasional untuk Pelaksanaan Program di Papua *

- Dukungan dari Bappenas untuk memasukkan rumusan konsep pembangunan Papua dalam penyusunan Renstra dalam K/L ----> diperlukan koordinasi teknis dengan K/L.
- Dukungan Pemerintah Pusat untuk memperkuat pembangunan Papua untuk melakukan lompatan terhadap ketertinggalan.
- Dukungan dari mitra pembangunan yang terfokus dan terintegrasi secara holistik.
- Strategi pendampingan yang memposisikan pendamping sebagai motivator.

RESPON PESERTA

FABIANUS ADOE

Kabag Pendapatan Kabupaten Puncak Jaya

Pertanyaan

Hasil komoditas wortel, kentang, kol organik perlu pemasaran.

Buka ruang khusus terhadap Musrenbang

- Bantu infrastruktur : Akses jalan kabupaten-distrik dan kampung
- Tidak ada guru yang mengajar - guru terima gaji tapi tidak mengajar
- Tidak ada listrik-bantu solar sel
- APBD tidak mencukupi
- Tingkat kemahalan sangat tinggi

Kepala BAPPEDA Biak Numfor

Pertanyaan

- UU 23/2014 tambah OPD baru.
- Perubahan Renja, RPJMD/N.
- Perlu penambahan anggaran untuk operasional jabatan baru dan adanya pemekaran distrik.
- Kemenkeu keluarkan instrument penganggaran ke kementerian. Juknis saling bertentangan antar kementerian.
- DAK membangun Perpustakaan di sekolah atau pembangunan lain tidak diperhitungkan kondisi lokasi, transportasi
- Bangun sekolah tetapi tidak didukung dengan meja dan kursi

TANGGAPAN

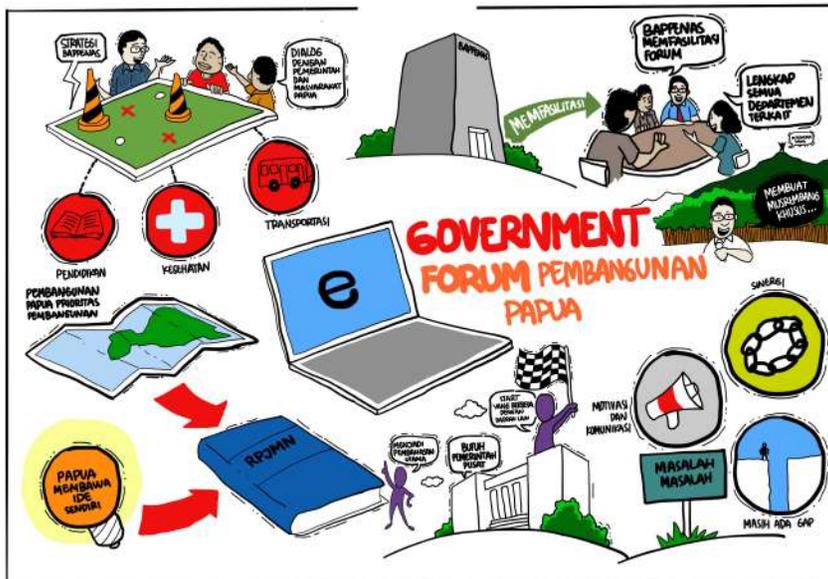
DR. IR. TAUFIK HANAFI, MUP (Desk Papua)

- Perlu ada kesepakatan lokus dan apa yang akan dikembangkan.
- Program Pendidikan harus diperkuat untuk meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah.
- Kelistrikan : perlu ada inovasi dengan menggunakan energy terbarukan seperti penggunaan teknologi solar sel dan tenaga angin.
- Sedang dilakukan Finalisasi RPP tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran.
- Proposal dalam DAK perlu dilengkapi dengan keperluan pelengkap nya misalnya :
 1. Program pembangunan sekolah selain kebutuhan pembangunan fisik sekolah ditambahkan kebutuhan mebeler dalam satu paket usulan.
 2. Program pembangunan perpustakaan sekolah harus ditambahkan pengadaan buku dalam satu paket usulan.

- Telah dilakukan Rapat Koordinasi Teknis untuk Kawasan Timur Indonesia di Makassar.
- Proses ini dilanjutkan dengan melakukan Musrenbangsus yang akan disatukan dengan Rakortekwil pada Minggu III Maret 2017 dengan 3 lokasi yaitu:
 1. Lapago di Kota Wamena
 2. Mamta dan Animha di Kota Jayapura
 3. Saireri dan Meepago di Kota Biak

Prosesnya :

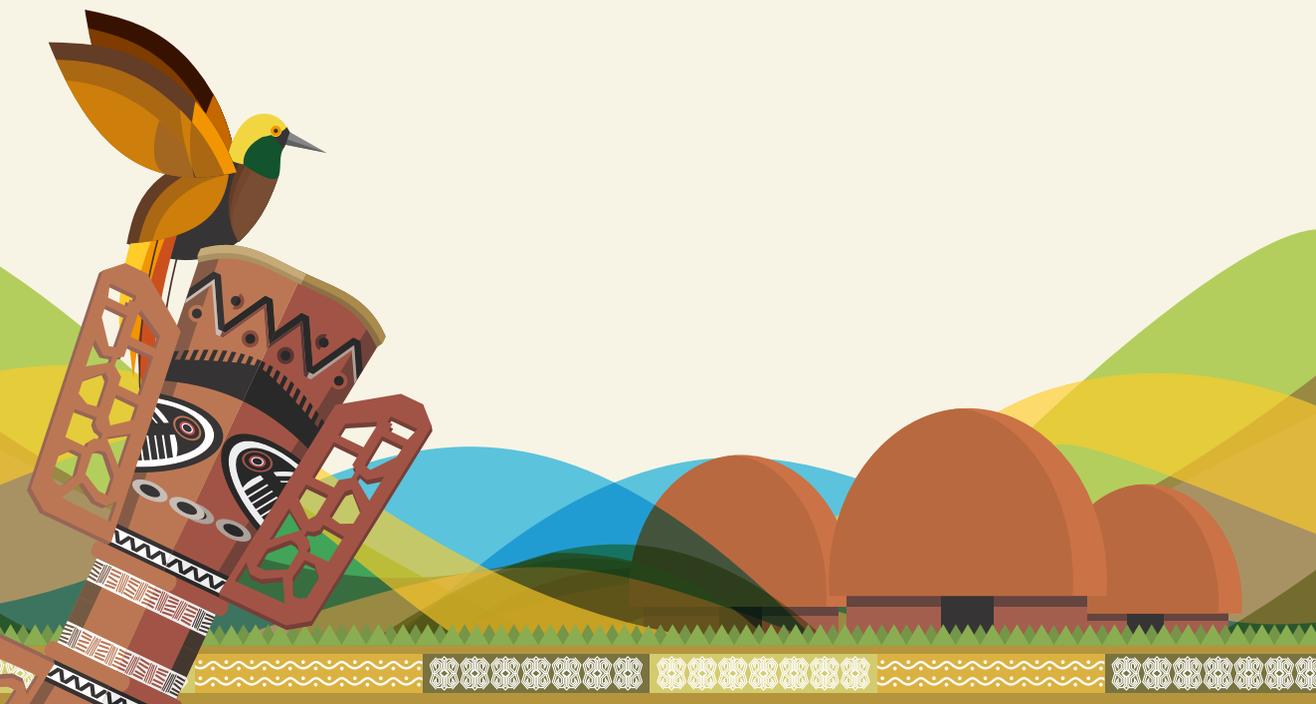
- Penggunaan 80% Dana Otsus untuk Kabupaten sebagai Usaha Bersama – Gerbang Mas (Lintas Kabupaten).
- Rakortekwil akan dilakukan untuk memastikan lokus program
- Untuk pembangunan infrastruktur, setiap kabupaten harus memastikan kejelasan hukum terhadap tanah yang akan digunakan.
- Perlu mapping Mitra Pembangunan :
 - (1) siapa mengerjakan apa; (2) mendukung program yang sudah ada; (3) Sinergikan kerja di level apa dan bikin apa.
- Program Pengembangan PICO UNDP dilanjutkan dengan Program Gerbang Mas.
- Jembatan Holtekam yang dibangun adalah kerjasama penganggaran sebagai upaya antara Pemkot Jayapura, Pemprov Papua dan Pemerintah Pusat.
- Akan diresmikan RS Regional di Nabire perlu dukungan untuk memperkuat manajemen RS untuk saling mengisi antar Pemkab dan Mitra Pembangunan.





FORUM PEMBANGUNAN PAPUA

SwisBell Hotel Jayapura
9 Maret 2017





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

FORUM PEMBANGUNAN PAPUA

JAYAPURA, 9 MARET 2017



TALK SHOW P E M B E R D A Y A A N T E M A T I K EKONOMI DAN MASYARAKAT

TOPIK: KAMPUNG BISA !

TEDDY WEOHAU

Direktur Sub-Nasional KOMPAK

Nama Praktik Baik

- Program LANDASAN Papua (Layanan Pendidikan dan Kesehatan di Tanah Papua) yang dikerjakan oleh AIPD (2013 – 2015) dan KOMPAK (2016 – 2018).
- Program Kerjasama Pemerintah RI dan Australia, SA (Subsidiary Arrangement) nya ditandatangani pada Des 2015.

Isu yang Disasar

Perbaikan Layanan Dasar (Perbaikan Tata Kelola Sekolah dan Puskesmas) yang terintegrasi dengan Perbaikan Tata Keloka Kampung dan Distrik.

Strategi Pelaksanaan

- Melakukan intervensi langsung ke masyarakat dan Pemkab.
- Penguatan Kapasitas Individu dan Kelembagaan Kampung dan Unit Layanan serta mendorong distrik menjadi Pusat Pengembangan Wilayah.
- Penguatan mekanisme komunikasi dan koordinasi dengan Distrik-Kabupaten-Provinsi.

Kendala / Tantangan

- Replikasi berbagai program berhasil pada perencanaan dan penganggaran daerah.
- Tingkat Partisipasi seluruh pihak termasuk OPD di Musyawarah di tingkat Distrik.
- Arah perencanaan pembangunan yang belum terintegrasi secara maksimal.

Kondisi / Prasyarat

- Perlu merumuskan strategi penguatan kapasitas Pemerintah Kampung dan Unit Layanan untuk perbaikan tata kelola.
- Perlu membangun proses yang terintegrasi dan kolaboratif. Dengan menghubungkan kebijakan Pemda, Unit Layanan dan Kampung difasilitasi oleh Distrik.

FREDDY MOLLE

Kabid Ekonomi Bappeda Provinsi Papua

Nama Praktik Baik

- Program Gerbang Mas
- Program PROSPEK

Isu yang Disasar

Penguatan Kapasitas Ekonomi Kampung dan Perencanaan Kampung

Strategi Pelaksanaan

- Pemilihan Kampung dan Distrik Potensial.
- Pendampingan Kampung dan Distrik oleh Pendamping Distrik.

Kendala / Tantangan

- Kendala dalam setiap program :
 1. Struktural
 2. Kelembagaan
 3. SDM
 4. Pemetaan Potensi Sumber Daya
- Belum terpenuhinya prasyarat di Kampung berkaitan dengan perencanaan dan pengembangan ekonomi kampung.
- Penerapan teknologi sederhana.

Kondisi / Prasyarat

- Kampung perlu mendiskusikan arah pembangunan kampung.
- Perlu ada strategi pendampingan dan kapasitas pendamping untuk membangun kemandirian.

BRUNO ETNOP

Ketua Koperasi Nonggup Kab. Boven Digoel

Nama Praktik Baik

Koperasi Nonggup

Isu yang Disasar

Penguatan kapasitas ekonomi berkaitan dengan pemasaran termasuk kepastian harga.

Strategi Pelaksanaan

- Mengorganisir masyarakat untuk memperbaiki strategi pemasaran dan stabilitas harga karet.
- Tahun 2009 membangun lembaga ekonomi yang berbadan hukum Koperasi.
- Tahun 2010 Koperasi Nonggup didirikan.
- Karet dijual ke Koperasi.
- SHU mencukupi kebutuhan anggota.
- Masyarakat aktif dukung koperasi.
- Harga lebih baik.

Kendala / Tantangan

Monopoli / Penguasaan ekonomi kampung oleh tengkulak / pedagang perantara sehingga selalu tidak menguntungkan petani (misalnya getah karet 50 kg ditukar dengan 1 dus mi instan).

Kondisi / Prasyarat

Perlu mendapat dukungan dari Pemerintah Distrik untuk membangun orientasi pembangunan dan memberikan perlindungan terhadap praktik monopoli.

YAN KAROWA

Kepala Distrik Iniyandit Kab. Boven Digoel

Nama Praktik Baik

Koperasi Nonggup

Isu yang Disasar

Penguatan kapasitas ekonomi kampung berbasis potensi Sumber Daya Lokal

Strategi Pelaksanaan

- Menggunakan kapasitasnya sebagai Kepala Distrik untuk mendampingi masyarakat.
- Mendorong OPD terkait lainnya untuk bisa mendukung kampung, dengan melakukan rapat koordinasi setiap hari Jumat.

Kendala / Tantangan

Perlu ada orientasi bersama dari seluruh pihak untuk membangun ekonomi kampung.

Kondisi / Prasyarat

- Perlu ada peran aktif masyarakat (subjek pembangunan) dan semua pemangku kepentingan, termasuk OPD terkait.
- OPD perlu memposisikan peran strategis distrik sebagai pusat pengembangan wilayah.



RESPON PESERTA

RUDOLF MORIN

Dinas Kominfo

Pertanyaan

Dasar Pemikiran : Pelayanan pemerintah di masa Pemerintahan Belanda di Papua, dalam kaitannya dengan kepastian pemenuhan hal dasar untuk para pelayan publik lebih baik dan pasti dibanding saat ini. Dana Otsus belum maksimal digunakan untuk kepentingan masyarakat. Pengalaman di kampung Dana Otsus hanya diterima Rp 50,000/kk.

Usulan :

- Mengembangkan pembangunan dengan pola PIR, membangun pola *short cut* untuk memaksimalkan kinerja pemerintah, perbaikan ekonomi untuk pemenuhan gizi masyarakat.
- Mengusulkan prioritas di bidang peternakan untuk perbaikan produksi ayam dan telur untuk memenuhi kebutuhan Papua.

DOMINGGUS RUMADAS

Dinas PMK Papua

Pertanyaan

Masukan/informasi :

- Persoalan Kelembagaan: pemerintah sedang mengarahkan kampung untuk meningkatkan pendapatan kampung.
- Pengurusan badan hukum untuk BUMKAM, sebagai pilihan dan mendorong usaha bersama sebagai cikal bakal terbentuknya Koperasi.

PIETER

Satgas UU Misi di Papua

Pertanyaan

- Inisiasi WWI, memberdayakan manusia.
- 1980 : Jeruk Manis dan Nenas yang dijual di Wamena berasal dari Boven Digoel.
- Struktur kelembagaan dapat dilakukan kalau SDMnya Apa peran Dinas Koperasi.
- Mitra Pembangunan dapat membantu dalam koordinasi.

Usul perbaikan :

1. Pastikan Koordinasi antara Provinsi dan Kabupaten, kerjasama antar OPD.
2. Fokus, untuk merencanakan berapa koperasi yang akan dibangun diberdayakan.

VINCENT

Dinas Kesehatan/Wakil Ketua APINDO

Pertanyaan

- Perlu dibangun strategi Kemandirian dan Keberlanjutan pasca dukungan dari Mitra Pembangunan
- Bagaimana teknis pengelolaan karet?

ROBERT MANDOSIR

LESTARI

Pertanyaan

- Aspek keberlanjutan
- Cluster 5 wilayah adat, belum punya portofolio untuk mendorong pengembangan ekonomi; serta belum punya data keunggulan komparatif dari setiap wilayah adat
- Makro policy dan makro spasial policy tidak sesuai dengan potensi dan kebutuhan
- Belum ada integrasi kebijakan kampung-distrik-kab.-provinsi
- Keunggulan komparatif belum dikembangkan
- Ada sekitar 120 LSM di Papua yang tidak saling kerja sama.

JOHN TUKAN PRISMA

Pertanyaan

- Mendekatkan masyarakat produsen ke pasar.
- Insentif dari pihak swasta untuk bekerjasama.
- Upayakan penanaman sayur untuk pemenuhan kebutuhan lokal.
- Peluang lakukan ekspor cokelat untuk kabupaten penghasil cokelat.

TANGGAPAN

BAPPEDA

- Kawasan pembangunan Papua dibagi dalam 5 wilayah adat (terdapat dalam UU Otsus), untuk dapat melokalisir masalah dan diupayakan untuk menemukan solusinya. Sejak 2013 Perencanaan Pembangunan di Papua telah dilakukan dengan pertimbangan social-kultural Papua.
- Telah dilakukan pemetaan komoditas unggulan per wilayah/kawasan adat. Syarat unggulan yaitu apa yang dikuasai masyarakat dan potensi yang sudah digerakkan atau menjadi kehidupan.
 - Saereri : perikanan dan pariwisata.
 - Meepago : Kopi dan Holtikultura menuju pembangunan industri.
- Proses fasilitasi menghubungkan antara pemerintah dan masyarakat : Kumpulkan informasi, identifikasi pengalaman baik.
- Tugas Pemerintah:
 1. Melayani,
 2. Mengatur,
 3. Memberdayakan
- K2MPD didirikan untuk pusat koordinasi dan informasi untuk seluruh Mitra Pembangunan, CSO dan menghubungkan dengan seluruh OPD/ Pemerintah.
- Seluruh Mitra Pembangunan perlu mendiskusikan berbagai rencana program dengan Pemerintah, membuat kesepakatan bersama didasarkan pada kebutuhan, serta menentukan peran (siapa lakukan apa)
- Perlu mempelajari berbagai pengalaman melakukan program untuk memperbaiki perencanaan, strategi dan pendekatan pelaksanaan, serta lakukan MONEV bersama.



- Kecamatan diubah menjadi Distrik dengan harapan dapat mengembalikan fungsi strategis Distrik seperti era Belanda, semakin jauh lokasi Distrik dari Kabupaten/Kota Kepala Distrik dapat berperan sebagai Bupati; untuk itu perlu ada upaya lakukan desentralisasi kewenangan.
- Pemerintah perlu replikasi program yang telah berhasil dilakukan oleh Mitra Pembangunan.
- Kebijakan 80% anggaran daerah / Propinsi ke Kabupaten (25% untuk ekonomi Gerbang Mas untuk ekonomi kampung).
- Dana Desa dari APBN dan ADK dari APBD telah dialokasikan ke kampung.
- Mitra Pembangunan dan Civil Society perlu bekerja sama dengan Pemda Provinsi dan Kabupaten agar dapat mendaya-gunakan seluruh potensi di Papua untuk kesejahteraan masyarakat.

KOMPAK

- Ada beberapa program misalnya PRISMA di bidang Pertanian.
- Perbaiki regulasi agar pemanfaatan/pengelolaan berbagai sumber pendanaan yang masuk ke kampung (Dana Desa, ADK, atau sumber dana lain).
- Banyak kampung yang sudah memiliki tata kelola yang baik yang dapat dijadikan tempat Studi banding untuk lihat transparansi kampung.
- Bangun Sistem Administrasi dan Informasi Kampung dan Distrik untuk mendorong Sistem Data terintegrasi.
- Perlunya membangun integrasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi.
- Pembiayaan guru bantu oleh APB Kampung.

Usulan :

- Setiap program di Papua perlu merumuskan exit strategi bersama Pemda ketika program akan dimulai bersama Pemda (strategi keberlanjutan).
- Untuk Papua seluruh koordinasi antara Mitra Pembangunan dan Pemda akan dilakukan oleh K2MPD.
- Saat ini sedang dibahas RPP Kecamatan yang akan memberikan ruang strategis untuk Distrik sebagai Pusat Pengembangan Wilayah. Kepala Distrik akan diberikan kewenangan lebih besar untuk koordinasi dan pemenuhan kebutuhan dasar.

KOPERASI NONGGUP / DISTRIK INIYANDIT

- Koperasi Nonggup : inisiasinya dilakukan oleh WVI pada tahun 2010.
- 2014 – Mar 2015 : UNDP mengembangkan tanaman sayur.
- Koperasi tetap dilanjutkan karena perijinan sudah ada.
- Mitra Pembangunan dapat membantu komunikasi dan informasi

Ka. Distrik Iniyandit melakukan :

- Asistensi terhadap pengembangan rencana pembangunan pertanian terpadu. Proses dimulai dengan membuat kesepakatan bersama pemilik tanah untuk membangun sentra pertanian terpadu.
- Mendorong masyarakat menjadi anggota Koperasi Nonggup.
- Mendorong kemandirian ekonomi seluruh kampung di dalam Distrik Iniyandit.
- Mendorong integrasi antar OPD yang memiliki peran di kampung dan distrik serta didasarkan atas kebutuhan prioritas.
- Proses telah memperkuat kapasitas Ketua Koperasi dalam mengelola koperasi.
- Teknik penyadapan karet diperoleh turun temurun. Perlu belajar ke tempat lain untuk memperkuat kapasitas serta menambah orientasi.



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

FORUM PEMBANGUNAN PAPUA

JAYAPURA, 9 MARET 2017



TALK SHOW T E M A T I K

LINGKUNGAN HIDUP

TOPIK: PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

LILA

BAPPEDA PROV PAPUA

Nama Praktik Baik

Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

Isu yang Disasar

- Pengelolaan hutan secara berkelanjutan.
- 84% Masyarakat kampung ada di dalam kawasan hutan (bergantung di hutan) 10% area penggunaan lahan.

Strategi Pelaksanaan

- RTRW Papua :
 1. Perlindungan Ekonomi Kampung
 2. Perlindungan Sosio Cultural
 3. Perlindungan 90% Hutan
- Green Pembangunan (80% kampung di kawasan hutan)

Kendala / Tantangan

- Kapasitas kelembagaan pemerintah daerah.
- Kesulitan akses karena letak geografis.
- Tingkat kemiskinan tinggi.

Kondisi / Prasyarat

- Perlu memperhatikan Hak-hak Masyarakat Adat atas Tanah.
- Pemda perlu bekerja sama dengan Mitra Pembangunan.

EDO BONAY LESTARI

Nama Praktik Baik

Keberlanjutan Keanekaragaman Hayati

Isu yang Disasar

- Pengelolaan hutan secara berkelanjutan.
- 84% Masyarakat kampung ada di dalam kawasan hutan (bergantung di hutan)10% area penggunaan lahan.

Strategi Pelaksanaan

- Management Kolaboratif (Berbagi *Stakeholder*)
- Pengembangan (Modul) Sistem Monitoring/Hutan dan Lahan
- Penyerapan Anggaran
- Papua punya 25 kawasan konservasi

- Pembangunan berwawasan lingkungan "harus berkelanjutan" sehingga meningkatkan kualitas manusia secara bertahap.
- Pembangunan berbasis kearifan lokal :
 - Ruang Kelda Rakyat
 - Pemetaan Ulayat
 - Penguatan kapasitas Masyarakat Adat

Kendala / Tantangan

Dampak Pembangunan ke lingkungan dan hutan.

Kondisi / Prasyarat

- Perlu memperhatikan Hak-hak Masyarakat Adat atas Tanah.
- Perlindungan Taman Nasional (kawasan konservasi) harus disertakan dengan pemberdayaan masyarakat kampung yang tinggal di sekitarnya 84% Masyarakat kampung ada di dalam kawasan hutan (bergantung di hutan).

ROBERT MANDOSIR

SETAPAK

Nama Praktik Baik

Selamatkan lahan dan hutan melalui Tata Kelola

Isu yang Disasar

Perbaiki tata kelola lahan dan hutan didasarkan atas filosofi :
Hutan itu Ibu dan Mama dari orang kampung di Papua.

Strategi Pelaksanaan

- Perda No. 23 Tentang Tata Ruang (RTRW) dijadikan sebagai arahan dan fungsi ruang untuk pembangunan masih belum sinkron dengan RTRW di kab/kota.
- Melakukan 3 upaya :
 - Membangun akses dan transparansi data
 - Akunbilitas perijinan

- Penguatan kapasitas CSO
- Monev
- Pembangunan Papua berdasarkan budaya dan pandangan hidup rakyat Papua.

Kendala / Tantangan

Kebijakan Pembangunan untuk sektor pertambangan, akan berdampak pada kualitas air, sungai, dan laut.

Kondisi / Prasyarat

- Perlu partisipasi masyarakat termasuk adat, kerjasama.
- Perlu ada exit strategy.
- Proses Perijinan :
 - Instrument (Amdal)
 - Struktur dan pola ruang
 - Tata kelola wilayah Adat
- Pembangunan Papua berkelanjutan membutuhkan mitra, mitra yang dibutuhkan adalah yang bergerak dalam jasa lingkungan.

ARMAN

ICRAF

Nama Praktik Baik

Penurunan emisi dengan menggerakkan pertumbuhan ekonomi

Isu yang Disasar

Lingkungan Berkelanjutan

Strategi Pelaksanaan

- Mengembangkan modul monitoring dan evaluasi lingkungan sampai pada outcome karena biasanya hanya sampai pada output.
- Mendorong perencanaan tata ruang yang bertujuan untuk mengurangi Efek Rumah Kaca.
- SIMTARU (Pembangunan Sistem Data).

Kendala / Tantangan

Belum ada Modul Money Outcome.

Kondisi / Prasyarat

- Adanya kebijakan pemkab dan pemprov yang berkaitan dengan perlindungan berkelanjutan.
- Adanya partisipasi dari Pemprov / Pemkab, Mitra Pembangunan dan Masyarakat.



RESPON PESERTA

FRANS GUNAPA
SEKDA DOGIYAI

Pertanyaan

- Orang Papua belum sejahtera dihubungkan dengan potensi
- HPH – tidak berhubungan dengan kesejahteraan orang asli
- 84% masyarakat tinggal di hutan/kampung – teknik pendekatan
- Dana Otsus tidak terserap
- 26 suku didaerah terpencil belum menerima proses pembangunan
- Pertambangan – Freeport tidak
- Punya uranium

- Pendekatan pembangunan berbasis konteks lokal
- Kopi Murni dari Dogiyai
- Partisipasi masyarakat

REFLY OMBUH

DINAS PERHUBUNGAN DAN KOMINFO YALIMO

Pertanyaan

- Pemanasan global
- Salju abadi (2015) menurun dan tidak sampai 2 Ha
- 1991 Wamena dingin, sekarang sudah panas
- Papua Indah ada negeri di atas bintang
- Rencana bangun pelabuhan
- Sikap pemerintah

TOM

KEDUTAAN INGGRIS

Pertanyaan

- Bekerja di Isu Perubahan Iklim
- Papua dan Indonesia sebagai paru-paru dunia
- Prioritas sama dengan Pemprov Papua
- Prioritas : Pembangunan Hijau
- Pembangunan harus dilakukan sejalan dengan mempertahankan
- 80% membantu kegiatan berbasis berkelanjutan dengan lingkungan yang hijau
- Perencanaan Sentorom transparansi keadilan dan masyarakat terlibat dalam pembangunan
- Komunitas adat tentang hak-hak atas tanah mereka
- Ingin melindungi TN dengan seluruh keindahan
- Harapan anak cucu bisa tetap lagukan Tanah Papua dihubungkan dengan kondisi alam yang tidak rusak
- Perlu kerjasama K2MPD untuk terus berkomunikasi dengan Pemda dan Mitra lainnya termasuk membangun exit strategy dan sharing.

TANGGAPAN

BAPPEDA

- Model pembangunan untuk tekan pemanasan global.
- Mekanisme perdagangan karbon belum jelas
- Realistis proses :
 - Gunakan pendekatan implementing, mengurangi pemanasan global dalam seluruh pembangunan yang dilakukan / berkelanjutan
 - Pendekatan berbasis kearifan lokal untuk lakukan Perencanaan partisipatif
 - Pergub Perijinan tentang Penggunaan Ruang
- Surat bukti pelepasan ulayat, masyarakat harus dimampukan untuk paham dan berhubungan perbaikan kualitas hidup masyarakat.

LESTARI

- Perubahan iklim terjadi karena Deforestasi (hutan ditebang, berubah fungsi menjadi perkebunan), degradasi lahan
- Bangun RAN, SIMTARU harus diimplementasikan, pusat menkoordinasikan data dan diupdate
- Baca arti Papua untuk dunia, ancaman untuk Papua adalah ancaman untuk dunia

SETAPAK

- Perbaikan Hutan itu berkaitan dengan Perubahan Iklim, Pak Bas hanya boleh 10% dari RTRW dibuat oleh Protari, GRK 13,75%, Pembangunan Berkelanjutan korelasi dengan 90% Pulau Dolok, Asmat, Kokonau, Dogiyai
- 90% sebagai paru-paru dunia – hutan cadangan, awasan konservasi
- Dorongan Hutan Adat didukung Asia Foundation, SK Hutan Adat
- Perlu tekan laju perijinan pembukaan hutan
- Penanaman ulang untuk hutan yang telah dibuka, Kelapa Sawit mau masuk di Dogiyai
- Investasi Hutan/Tambang harus, hutan adat sebagai alat proteksi melindungi 90%

SETAPAK

- Perbaikan Hutan itu berkaitan dengan Perubahan Iklim, Pak Bas hanya boleh 10% dari RTRW dibuat oleh Protari, GRK 13,75%, Pembangunan Berkelanjutan korelasi dengan 90% Pulau Dolok, Asmat, Kokonau, Dogiyai
- 90% sebagai paru-paru dunia – hutan cadangan, awasan konservasi
- Dorongan Hutan Adat didukung Asia Foundation, SK Hutan Adat
- Perlu tekan laju perijinan pembukaan hutan
- Penanaman ulang untuk hutan yang telah dibuka, Kelapa Sawit mau masuk di Dogiyai
- Investasi Hutan / Tambang harus, hutan adat sebagai alat proteksi melindungi 90%

ICRAF

- Pemahaman Climate Change sebagai tantangan, pendampingan untuk bangun pemahaman kabupaten. Kapasitas dari tenaga LSM sudah ada, Pemda dapat memaksimalkan untuk proses pendampingan.
- Perencanaan pembangunan beremisi. *One map policy* perlu dilakukan, dokumennya akan diberikan pada akhir workshop.
- Ada hitungan nilai ekonomis ketika diterapkan. Perlu ada amanat pemerintah (sudah ada Pergub) yang menjadi hak wajib dari kabupaten untuk mensinkronkan perencanaan kabupaten dan propinsi.
- Sistem pembelajaran di universitas.





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

FORUM PEMBANGUNAN PAPUA

JAYAPURA, 9 MARET 2017



TALK SHOW | PENDIDIKAN T E M A T I K

TOPIK: SAYA PANDAI CALISTUNG

ALOSIUS YOPEN

KABID PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI PAPUA

Nama Praktik Baik

- Wahana Tata Akademik Prof. Willy Toisuta (Penelitian Situasi Pendidikan di Papua)
- Mitra Pembangunan : WVI, Kinerja
- Yayasan Kristen Indonesia: cetak buku Calistung

Isu yang Disasar

Pendidikan Dasar : PAUD, TK, SD Kelas I-III

Strategi Pelaksanaan

- Mengajar dengan menggunakan Bahasa ibu di Lany Jaya
- Perlu 1 tahun pendampingan untuk Sekolah
- Ada pendamping Gerbang Mas khusus untuk Pendidikan
- Siapkan Guru Kontrak yang dibiayai APBD Provinsi (dana 7 M)

Kendala / Tantangan

- Guru yang dilatih tidak melanjutkan apa yang dilatihkan
- Kerjasama Dinas Pendidikan dengan Mitra Pembangunan
- Persoalan Utama mau ke sekolah :
- Tingkat asupan gizi anak (5-15 tahun) yang cenderung rendah
- Pola asuh orang tua, anak dipaksa bekerja ke kebun di saat jam sekolah
- Tingkat kehadiran guru di Sekolah rendah (82% guru tidak hadir di sekolah. Guru datang hanya pada waktu ujian saja)

Kondisi / Prasyarat

- Penyiapan guru yang berkualitas
- Pemerataan guru
- Pengawasan kehadiran guru di sekolah

GEORGE PIKER

ACDP

Nama Praktik Baik

Kurikulum Sekolah yang multi bahasa

Isu yang Disasar

Kurikulum Sekolah yang menggunakan Bahasa Lanny dan Bahasa Indonesia

Strategi Pelaksanaan

- Bangun paradigma dan strategi guru untuk mengajar dengan multi Bahasa (Bahasa Lanny dan Bahasa Indonesia); gunakan kurikulum dengan 2 bahasa untuk efektif untuk transisi ke Bahasa Indonesia
- Bangun kerjasama antara KPG, PGSD dan UNCEN
- Lakukan uji coba di Lany Jaya, praktiki PAUD, TK, SD kelas I

Kendala / Tantangan

- 90% guru di Distrik Firiwage tidak hadir
- Guru sulit gunakan kurikulum berbahasa Indonesia.
- Murid lebih bisa membaca dari Guru yang mengajar
- Kesulitan letak geografis

Kondisi / Prasyarat

- Memastikan kehadiran guru dan Kepsek.
- Perlu strategi transisi kurikulum dari pusat untuk gunakan konteks lokal.
- Cek fasilitas, bangun interaksi dengan masyarakat.
- Penggunaan multi Bahasa hanya dilakukan di daerah yang masih menggunakan bahasa daerah.

DAVID SIKIRIT

UNICEF

Nama Praktik Baik

- Pengajaran Literasi di 4 Kabupaten : Jayapura, Biak Numfor, Jayawijaya, Mimika
- Guru SD hanya lulus SD, perlu didampingi.
- Siapkan bahan pembelajaran. Bantu siapkan RPP (Rencana Pembelajaran)

Isu yang Disasar

4 Kabupaten untuk pengajaran literasi.

Strategi Pelaksanaan

- Bekerja dengan masyarakat. Diskusi bersama di gereja, kelompok masyarakat.
- Bersama Dinas Pendidikan buat RENJA
- Program belajar di daerah pinggiran dan terpencil untuk masyarakat asli Papua; bekerja 80 sekolah (20 sekolah per Kabupaten)
- Anak kampung lulusan SMA dan PT diminta pengajar untuk atasi ketidakhadiran guru
- Kerja langsung pendampingan di level sekolah lebih efektif dibanding di,
- Training langsung dilakukan di tingkat gugus di dekat sekolah
- Penempatan pendamping guru kelas I, II, III untuk perkuat pengajaran baca tulis (prosesnya dilakukan langsung setelah mengajar)
- Siapkan Buku Bacaan untuk guru yang kontekstual. Ada cara pukul sagu, panggayu

Kendala / Tantangan

- Ketidak-hadiran guru dalam waktu yang cukup lama.
- 37% guru dan 57% Kepsek tidak hadir di sekolah.
- Partisipasi orang tua cenderung rendah.
- Pengawas Sekolah belum maksimal lakukan pengawasan.
- Literasi: 48,7% anak Papua belum bisa baca. Hanya 7,6% yang bisa baca dan mengerti.
- Disparitas literasi 55% di Jayawijaya.
- Buku yang dipasok dari pusat susah diserap.

Kondisi / Prasyarat

- Memastikan kehadiran guru.
- Memfokuskan pada CALISTUNG.
- Guru kelas I, II, III memiliki kapasitas untuk mendidik CALISTUNG anak dengan konteks lokal Papua.
- Ada strategi transisi untuk pemberlakuan Kurikulum Pendidikan Nasional.

JOHN RAHAIL

IPPM

Nama Praktik Baik

- Sekolah Kampung – Pendidikan berbasis Budaya
- Filosofinya: Sekolah sebagai
 - Kebunku,
 - Tempat bermainku,
 - Kampungku
- Sekolah tanpa guru, tanpa meja dan kursi, tanpa gedung / ruangan

Isu yang Disasar

Pendidikan Dasar di kampung-kampung

Strategi Pelaksanaan

- Gunakan media kehidupan sebagai alat bantu belajar : dayung perahu sambil belajar, akar dan kulit kayu sebagai upaya mendorong anak suka belajar dan mau bersekolah
- Hari Sabtu dijalankan dengan bernyanyi
- 3 kata kunci untuk Pendidikan di Kampung:
 1. Gunakan baju orang di kampung sesuai dengan budayanya
 2. Jangan bentuk kelompok baru, 3 tungku dan 2 perahu (perempuan dan anak)
 3. Nilai dan kearifan lokal

Kendala / Tantangan

Mengubah paradigme untuk Pendidikan yang berkelanjutan dan menyesuaikan dengan konteks lokal Papua.

Kondisi / Prasyarat

- Partisipasi orang tua untuk dukung proses belajar
- Perlu difasilitasi untuk masyarakat dapat menggunakan konteks lokal
- Masyarakat partisipasi dalam membangun proses belajar
- Perubahan paradigma untuk pendidikan yang berkelanjutan

RESPON PESERTA



TOBIAS

Pertanyaan

- Sistem Losomos
- Sekolah Yayasan berlangsung baik
- System penggajian guru harus diperbaiki
- Lulusan SPG Negeri Teruna Bakti mengajar anak di sekolah terpencil
- Pengambilan Dana BOS hanya dilakukan oleh Kepsek untuk gaji guru
- Ada guru yang beraabatan fungsional jangan diganggu dengan jabatan struktural

Solusi:

- Perlu ada uang nyamuk, uang dingin di daerah terpencil tunjangan
- Mendirikan SPG Khas Papua untuk guru-guru yang mengajar di pinggiran

IRFANI DARMA

Pertanyaan

- Exit strategy untuk UNICEF?
- Strategi pendampingan perlu didorong dibiayakan oleh APBD
- IPPM perlu didukung

- Belajar dari Kab. Lany Jaya rekrut guru banyak tetapi kecakapan rendah dengan melakukan kerjasama dengan Surya Institut, WVI
- Tantangan kapasitas pemerintah daerah sangat terbatas untuk melakukan replikasi
- Alumni KPG tidak menjadi guru
- Diberi tunjangan juga belum menjawab

Usul:

- Inisiatif Pak John perlu direplikasikan oleh Kabupaten

RINI MAYASARI
PENERJEMAH

Pertanyaan

- UNICEF punya buku-buku ajar, apakah bisa diakses oleh CSO.
- Apa Pemprov Papua punya program seperti Papua Mengajar; ada banyak potensial menjadi relawan.

Usul:

- Buku Untuk Papua (BUP) tidak berbasis dasar
- Penggunaan Buku yang populer. Buku Belajar Baca – Kota Emas

TANIA THENU
WFP

Pertanyaan

- WFP melakukan piloting di Kota Jayapura, Kab. Jayapura, Biak, Merauke dan Jayawijaya untuk Program PMTAS berbasis pangan local bekerjasama dengan PKK. Proses ini dilakukan oleh Tim Masak yang berasal Komite Sekolah.
- Ada Juknis yang telah direplikasi Kota Jayapura, Kab. Jayapura, Keerom dan Merauke.

TANGGAPAN

BAPPEDA

- Merujuk UU No.23, kewenangan pendidikan ada di kabupaten.
- Intervensi dilakukan pada area-area terbatas sesuai dengan batasan waktu
- Guru SD mau dipindahkan ke Kepala SKPD, dikembalikan kepada kesenangan Bupati.
- Lulusan KPG (KPG Merauke, Nabire dan Mimika), siap ditempatkan ke tempat terpencil; Sudah ada 9 angkatan kelulusan 800 orang belum ditempatkan untuk menjadi guru.
- Kapasitas aparatur pemerintah kabupaten/kota perlu ditingkatkan.
- Setiap tahun ada pertemuan Kabid Dikdas seluruh Provinsi Papua.
- Mendorong semua kabupaten jawab seluruh kebutuhan Pendidikan berbasis konteks lokal.
- Perlu peningkatan kualitas KPG.
- Perlu revitalisasi Komite Sekolah.

- Satgas – Gerakan Papua Cerdas dengan gunakan Guru Kontrak.
- PMTAS di Kab. Asmat, Mimika, Kab. Jayapura dan Wamena.

ACDP

- Suku yang mengambil keputusan tetapi Suku tidak menyadari bahwa nilai dasar yang cenderung hilang.
- Dari 290 Bahasa Daerah diperkirakan hanya sekitar 13 bahasa yang akan bertahan.
- Buat riset, hasilnya diserahkan ke Suku untuk diputuskan.

UNICEF

- Perlu proses adaptasi dengan model yang akan dikembangkan 2 tahapan buku, buku cerita rakyat bergambar sudah ada bisa diakses soft copynya.
- Kurikulum 2013 untuk seluruh pengajaran sudah dikontekskan Papua.
- Akan dikembangkan 43 buku bacaan dengan konteks lokal.
- Perlu dipikirkan exit strategy.



IPPM

- Rata-rata lama sekolah rendah karena siswa putus sekolah. Anak tidak sekolah
- Perlu partisipasi orang tua, pahami penting untuk dorong anak sekolah
- Perlu membangun rasa percaya diri
- Gunakan cerita / permainan local
- Proses baru dibangun di Sarmi didukung UNDP
- Pendekatan dilakukan dengan penguatan Komite dibantu KINERJA
- Perlu ada kerjasama 3 tungku untuk bangun proses pendidikan
- Perkuat Komite Sekolah, Partisipasi Kampung bangun integrasi



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

FORUM PEMBANGUNAN PAPUA

JAYAPURA, 9 MARET 2017



TALK SHOW | KESEHATAN T E M A T I K

TOPIK: SATGAS KIJANG

LESMAN TABUNI

DINAS KESEHATAN

Nama Praktik Baik

- Satgas Kijang 2014 “Puskesmas Kaki Telanjang dan Perahu Asmat”.
- Ada hasil yang positif untuk Kab. yang terisolir.

Isu yang Disasar

Perbaiki Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Masyarakat.

Strategi Pelaksanaan

- Dinkes Prov Papua lakukan raker dihadiri semua Dinkes Kab.
- Evaluasi rapor merah/bermasalah ada potensi tentang kesehatan yang tidak kerja.
- Titik mulai Satgas Kijang yaitu bekerja untuk 9 Kab. dan 12 Puskesmas sebagai titik mulai,
- Tim terdiri dari : dokter, perawat, kesling, analis, obat
- Sebelum turun ke lokasi Tim diberikan pembekalan dengan teknik fasilitasi dan komunikasi.
- Tim akan diantar dan diperkenalkan ke lokasi kerja, lakukan MONEV dan dijemput kembali
- Tahun 2015 : 16 Puskesmas di Pegunungan
- Tahun 2016 : (14M) 26 Puskesmas di April – Desember

Kendala / Tantangan

Penurunan dukungan APBD 2017 sehingga tidak dapat direkrut 200 orang anggota Satgas untuk 26 Kabupaten.

Kondisi / Prasyarat

- Perlu dipastikan kerjasama Pemkab dan Pemprov untuk saling memperkuat.
- Perlu ada jaminan keamanan untuk Tim KIJANG yang bekerja.

dr. RILIA MARISTELA

PJ PROGRAM CHAI DI PAPUA

Nama Praktik Baik

Program CHAI didanai oleh AusAID, Global Fund

Isu yang Disasar

Penanggulangan HIV di Kab. Jayawijaya, Peg. Bintang.

Strategi Pelaksanaan

- Melanjutkan apa yang telah dikerjakan oleh Pemkab untuk membuka akses pasien ODHA ke RS.
- Bekerja sampai di level Puskesmas.
- Bentuk Central of Excellent bantu analis sebagai bentuk desentralisasi pelayanan.

Kendala / Tantangan

Masih ada kabupaten yang belum maksimal menangani ODHA .

Kondisi / Prasyarat

Perlu ada kerjasama dan sinkronisasi kerja antara Pemprov / Pemkab dengan Mitra Pembangunan.

dr. I MADE LINGGAWIJAYA

YAYASAN PRIMARI PRAKARSA INDONESIA MANDIRI

Nama Praktik Baik

Pengobatan Penyakit menular (Diare, Pheunomia)

Isu yang Disasar

Penanganan Penyakit Menular di Kab. Nabire, Dogiyai, Mimika

Strategi Pelaksanaan

- Pembentukan kader sebagai Tim Kampung
- Pendirian Pos Obat Desa di Intan Jaya
- Promosi pencegahan HIV AIDS di SD dan SMP
- Lakukan pelatihan berseri seminggu sekali dengan topik tertentu di Puskesmas

Kendala / Tantangan

Dukungan untuk lakukan proses yang berkelanjutan.

Kondisi / Prasyarat

Partisipasi aktif masyarakat

RESPON PESERTA



FRANSISKUS WILLIAN
UNICEF

Pertanyaan

- Bagaimana kesediaan tenaga kesehatan di Dinkes?
- Bagaimana dengan replikasi program Kesehatan oleh Dinkes?
- Bagaimana dengan penderita HIV AIDS?

FRANS GUNAPA
SEKDA DOGIYAI

Pertanyaan

Tidak ada yang bertugas ke wilayah terpencil.

YAN KAROWA
KEPALA DISTRIK INIYANDIT

Pertanyaan

- Program Bina Desa, gunakan tenaga fungsional/PPL ingin menggali persoalan Kesehatan, Pendidikan.
- Birokrasi “jurang” menjadi jembatan untuk dikomunikasikan sesuai visi Bupati.
- Termasuk mengkritisi kinerja OPD yang tidak jalankan tugas dengan baik.

BAYU

Pertanyaan

- Akses, kualitas, kuantitas, keterjangkauan.
- Kebijakan Pemkab.
- Guru tidak urus gaji, kenaikan pangkat; dulu diatur oleh Penilik Sekolah saat ini tidak terjadi.

TANGGAPAN

DINAS KESEHATAN

- Pembangunan RS Regio Tipe B di 4 wilayah adat.
- Kekurangan tenaga kesehatan di wilayah tersebut.
- Alokasi anggaran 80% untuk digunakan untuk sekolahkan anak daerah ikut pendidikan kesehatan sebagai persiapan mendirikan RS.
- Kabupaten didorong untuk Replikasi Satgas Kaki Telanjang.
- Ada MOU antar Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten
- Tenaga Kerja yang direkrut oleh Dinas
- RS akan dibangun dalam 5 region
- Pendidikan Sekolah Kesehatan (AKPER, AKES, dsb) perlu dibuka di seluruh Kabupaten dibawah control DINKES PAPUA.

CHAI

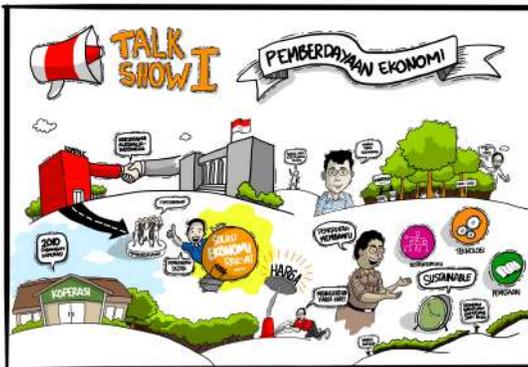
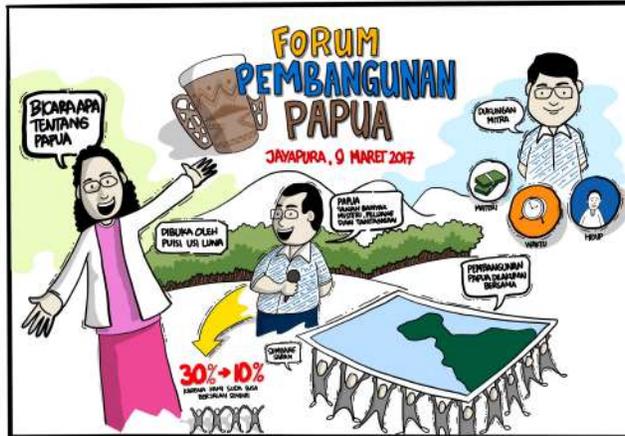
- Lakukan mentoring - KINERJA : absensi tenaga kesehatan
- Perlu adanya ketersediaan tenaga medis tertentu
- Tenaga analis / laboratorium sangat langka tidak ada sekolah analis
- HIV/AIDS, Malaria bisa dipastikan
- Mendekatkan pelayanan HIV AIDS ke Puskesmas
- Perlu didorong lahirnya central of excelent
- Perlu memperkuat peran kampung dalam mendukung persoalan kesehatan.
- Replikasi : dilakukan di Kab.Jayapura dan Kab. Nabire

CHAI

- Replikasi : arahkan program untuk dikerjasamakan dengan Pemkab.
- Buat pendekatan partisipatif yang memerlukan waktu lama. Untuk kader tanggap bencana, buat media penyuluhan yang di Buku Kelas I – VI untuk menghadapi bencana (kesulitan biaya cetak).
- Kader yang dilatih menuntut kapan akan diangkat menjadi pegawai puskesmas, kerelawanan dilawan oleh Pendamping PNPM yang membayar insentif, perlu standar insentif.



GRAPHIC RECORDER FORUM PEMBANGUNAN PAPUA



Terima Kasih





**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI PAPUA
2017**